



UPTD INSTALASI FARMASI
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



LAPORAN

PENGADAAN

OBAT DAN BMHP

BAKSOS

TAHUN 2025



TAHUN ANGGARAN
2025



UPTD INSTALASI FARMASI
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



uptdinstalasifarmasiprovkepri@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena Laporan Pelaksanaan Pengadaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) untuk Kegiatan Bakti Sosial Kesehatan Tahun Anggaran 2025 pada UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dapat disusun.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, sekaligus sebagai bahan dokumentasi dan evaluasi terhadap proses perencanaan, pengadaan, penerimaan, pengelolaan, dan pemanfaatan obat serta BMHP untuk mendukung pelayanan kesehatan dalam kegiatan bakti sosial.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih dapat disempurnakan. Oleh karena itu, laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan obat dan BMHP pada kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat pada tahun berikutnya.

Tanjungpinang, Desember 2025

Kepala Seksi Perencanaan dan Pemeliharaan

Vita Dianawati, Amd.Kep

NIP. 19820107 201001 2 011

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum

B. GAMBARAN UMUM PENGADAAN BAKSOS

1. Maksud dan Tujuan
2. Sasaran/Penerima Manfaat
3. Ruang Lingkup

C. PELAKSANAAN PENGADAAN

1. Perencanaan Kebutuhan
2. Proses Pengadaan
3. Penerimaan dan Pemeriksaan
4. Penyimpanan dan Penyaluran

D. HASIL DAN REALISASI

1. Daftar Pengadaan
2. Rekapitulasi Anggaran
3. Analisis Realisasi

F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

G. PENUTUP

LAMPIRAN DOKUMENTASI

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penyediaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) merupakan bagian penting dalam menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, efektif, dan berkesinambungan. Dalam pelaksanaan kegiatan bakti sosial kesehatan, ketersediaan obat dan BMHP menjadi salah satu unsur pendukung utama agar pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan sesuai kebutuhan.

UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai peran dalam mendukung ketersediaan dan pengelolaan logistik farmasi, termasuk untuk kebutuhan pelayanan kesehatan pada kegiatan bakti sosial. Pengadaan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan, jenis barang yang diperlukan, jumlah yang direncanakan, serta ketersediaan anggaran. Kegiatan pengadaan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan obat dan BMHP pada saat pelaksanaan kegiatan BAKSOS sehingga pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat dapat berjalan lancar dan efektif.

2. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

B. GAMBARAN UMUM PENGADAAN OBAT DAN BMHP BAKSOS

1. Maksud dan Tujuan

Maksud pengadaan adalah menyediakan obat dan BMHP yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bakti sosial kesehatan sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara efektif dan sesuai kebutuhan.

Tujuan khusus meliputi: (1) memenuhi kebutuhan obat dan BMHP untuk pelayanan bakti sosial; (2) menjamin ketersediaan logistik kesehatan pada saat pelayanan; (3) mendukung kelancaran pelayanan tenaga kesehatan; (4) memastikan pengelolaan barang dilakukan secara tertib; dan (5) mewujudkan penggunaan anggaran secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

2. Sasaran/Penerima Manfaat

Sasaran kegiatan adalah masyarakat yang memperoleh pelayanan kesehatan melalui kegiatan bakti sosial, serta tenaga kesehatan/pelaksana pelayanan yang membutuhkan dukungan obat dan BMHP. Secara kelembagaan, kegiatan mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui UPTD Instalasi Farmasi dan jejaring pelayanan terkait.

3. Ruang Lingkup

- Penyusunan kebutuhan obat dan BMHP.
- Pengadaan sesuai mekanisme yang berlaku.
- Penerimaan dan pemeriksaan barang.
- Pencatatan dan penyimpanan.
- Penyiapan/penyaluran untuk kebutuhan bakti sosial.
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan.

4. Indikator Keberhasilan

- Tersedianya obat dan BMHP sesuai daftar kebutuhan.
- Pengadaan terlaksana dalam pagu yang tersedia.
- Barang yang diterima sesuai jenis, jumlah dan kondisi yang dipersyaratkan.
- Dukungan logistik tersedia untuk pelaksanaan bakti sosial.
- Tersusunnya dokumen administrasi dan pertanggungjawaban kegiatan.

C. PELAKSANAAN PENGADAAN

1. Perencanaan Kebutuhan

Perencanaan kebutuhan dilakukan dengan mengidentifikasi usulan dari Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, jenis dan jumlah obat serta BMHP yang diperlukan untuk mendukung pelayanan bakti sosial. Daftar kebutuhan kemudian disesuaikan dengan pagu yang tersedia sebesar Rp50.000.000,00. Perencanaan juga mempertimbangkan kebutuhan pelayanan dan harga satuan barang.

2. Proses Pengadaan

Pelaksanaan pengadaan dilakukan sesuai mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku. Pemilihan barang dan penyedia dilakukan berdasarkan kebutuhan dan dokumen pengadaan, dengan memperhatikan kesesuaian spesifikasi, harga, dan ketersediaan barang.

3. Penerimaan dan Pemeriksaan

Barang yang diperoleh dilakukan pemeriksaan pada saat penerimaan untuk memastikan kesesuaian jenis, jumlah, kondisi fisik, serta dokumen pendukung. Pemeriksaan merupakan bagian penting untuk memastikan barang yang masuk dapat dipertanggungjawabkan dan aman untuk digunakan dalam pelayanan.

4. Penyimpanan dan Penyaluran

Obat dan BMHP yang telah diterima dikelola sesuai tata kelola logistik farmasi. Barang disimpan dengan memperhatikan keamanan, kondisi penyimpanan, serta prinsip pengelolaan persediaan. Penyaluran dilakukan sesuai kebutuhan kegiatan bakti sosial dan dokumen permintaan/penyaluran.

5. Pencatatan dan Dokumentasi

Setiap tahapan didukung dengan dokumen administrasi pengadaan, penerimaan, dan penyaluran. Dokumentasi menjadi bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan bahan monitoring serta evaluasi.

D. HASIL DAN REALISASI

1. Rekapitulasi Pengadaan

No	Uraian	Nilai	Keterangan
1	Pagu anggaran pengadaan bakti sosial	Rp50.000.000,00	Pagu tersedia
2	Nilai pengadaan/realisasi	Rp49.612.110,00	Sesuai daftar pengadaan
3	Sisa anggaran	Rp387.890,00	Cut off
4	Persentase realisasi	99,22%	49.612.110 / 50.000.000
5	Persentase sisa	0,78%	387.890 / 50.000.000

2. Daftar Pengadaan Obat dan BMHP

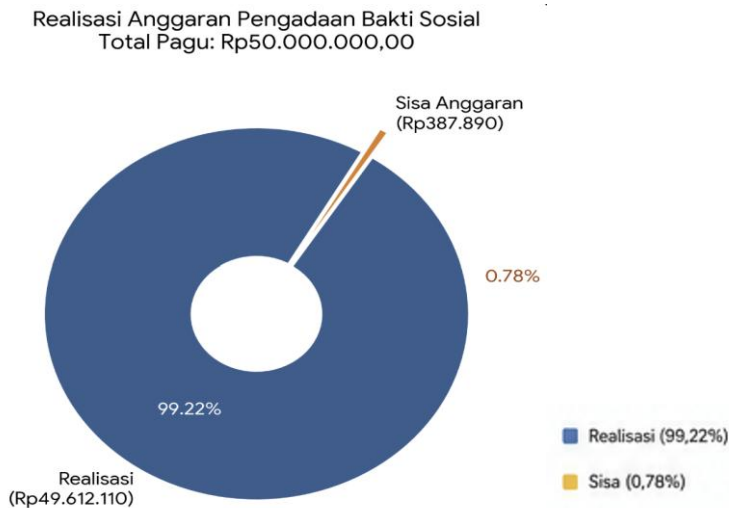
No	Nama Obat/BMHP	Kemasan	Jumlah	Harga Satuan	Total
1	Permetrin Krim 5% @10G	Tube	30	Rp6.641	Rp199.230
2	Framycetin Sulfat Tulle 1%	Dus, 10 kasa steril (ukuran 10 x 10 cm)	30	Rp11.317	Rp339.510
3	Glimepiride 2 mg	Dus, 10 strip, 10 tablet	2.500	Rp201	Rp502.500
4	Kalium Diklofenak 50 mg	Dus, 10 strip, 10 tablet salut enterik	2.500	Rp500	Rp1.250.000
5	Gemfibrozile 300 mg	Dus, 10 blister @ 10 kapsul	2.000	Rp770	Rp1.540.000
6	Attapulgate 600 mg	Dus, 10 strip, 10 tablet	1.500	Rp338	Rp507.000
7	Kasa steril 16 cm x 16 cm	Kasa steril 16 cm x 16 cm @16 lembar	30	Rp7.881	Rp291.430

8	Plesterin roll non woven roll 5 cm x 5 m	Roll	20	Rp24.198	Rp538.960
9	Piroxicam 20 mg	Box @ 100 TAB	2.000	Rp317	Rp634.000
10	Masker earlop 3ply	Box (isi 50 pcs)	2.600	Rp15.318	Rp43.809.480
	TOTAL				Rp49.612.110

E. ANALISIS REALISASI DAN HASIL KEGIATAN

1. Analisis Realisasi Anggaran

Pagu pengadaan obat dan BMHP untuk kegiatan bakti sosial Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp50.000.000,00. Nilai pengadaan yang tercantum dalam daftar sebesar Rp49.612.110,00. Dengan demikian, tingkat realisasi mencapai 99,22%, sedangkan sisa anggaran sebesar Rp387.890,00 atau 0,78%. Tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pengadaan dapat dipenuhi hampir seluruhnya dalam pagu yang telah ditetapkan.



2. Hasil Pelaksanaan

- Obat dan BMHP untuk mendukung kegiatan bakti sosial telah direncanakan dan diadakan sesuai kebutuhan yang tercantum dalam daftar pengadaan.
- Nilai pengadaan berada dalam pagu yang ditetapkan, dengan realisasi 99,22%.
- Pengadaan menghasilkan dukungan logistik yang dapat digunakan untuk menunjang pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- Administrasi pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran menjadi bagian penting dalam pertanggungjawaban kegiatan.

3. Manfaat

Manfaat utama kegiatan adalah tersedianya dukungan obat dan BMHP bagi pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegiatan bakti sosial. Ketersediaan logistik membantu tenaga kesehatan memberikan pelayanan sesuai kebutuhan dan memperlancar kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

4. Outcome

Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya kesiapan pelayanan kesehatan melalui tersedianya logistik farmasi yang dibutuhkan, serta terlaksananya kegiatan bakti sosial secara tertib dan berkesinambungan.

F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengadaan obat dan BMHP untuk kegiatan bakti sosial Tahun Anggaran 2025, dapat disimpulkan bahwa pengadaan telah dilaksanakan dengan pagu Rp50.000.000,00 dan nilai pengadaan sebesar Rp49.612.110,00. Dengan demikian, realisasi mencapai 99,22% dan terdapat sisa sebesar Rp387.890,00 atau 0,78%.

Pengadaan tersebut ditujukan untuk mendukung ketersediaan obat dan BMHP dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan melalui kegiatan bakti sosial. Pelaksanaan pengadaan, penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran perlu didukung administrasi yang tertib sehingga seluruh proses dapat dipertanggungjawabkan.

2. Rekomendasi

- Melakukan perencanaan kebutuhan secara lebih rinci berdasarkan sasaran dan jenis pelayanan bakti sosial.
- Melakukan pemutakhiran harga dan ketersediaan obat/BMHP sebelum penyusunan kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan.
- Meningkatkan koordinasi antara UPTD Instalasi Farmasi, pelaksana kegiatan, dan penyedia.
- Memperkuat monitoring penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran agar sesuai kebutuhan.
- Memanfaatkan hasil evaluasi dan data realisasi sebagai dasar penyusunan pengadaan tahun berikutnya.
- Mempertahankan efisiensi pengadaan tanpa mengurangi mutu dan kecukupan logistik pelayanan.

3. Penutup

Demikian laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan obat dan BMHP untuk kegiatan bakti sosial Tahun Anggaran 2025. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan pengadaan serta pengelolaan logistik farmasi pada tahun anggaran berikutnya.

LAMPIRAN 1. REKAPITULASI NILAI PENGADAAN

Uraian	Nilai	Persentase
Pagu	Rp50.000.000,00	100,00%
Realisasi	Rp49.612.110,00	99,22%
Sisa	Rp387.890,00	0,78%

LAMPIRAN 2. DOKUMENTASI







